

Apakah OKI Masih Relevan bagi Polugri Indonesia?

A.M. Sidqi

Diplomat Indonesia bertugas di KBRI Riyadh

Abstrak

Indonesia merupakan pendiri dan anggota awal Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sejak 1969. Selama ini peran dan kiprah Indonesia di OKI dipandang kurang optimal bahkan cenderung setengah hati (*reluctant*). Padahal di sisi lain, OKI merupakan organisasi terbesar kedua di dunia dengan 57 negara anggota tersebar di 4 kawasan (Asia, Arab, Afrika, dan Amerika) dan berperan penting dalam mewujudkan solidaritas umat muslim dan memperjuangkan isu-isu strategis, seperti Palestina, Rohingya, Islamophobia, dan muslim minoritas. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan apakah OKI masih relevan bagi politik luar negeri (polugri) Indonesia? Artikel ini membahas kepemimpinan dan kiprah Indonesia pada OKI dari masa Presiden Suharto hingga Presiden Jokowi. Artikel ini berkesimpulan bahwa OKI telah menjadi bagian integral dalam polugri Indonesia, meskipun terdapat faktor yang menyebabkan keengganan bagi Indonesia untuk lebih aktif di OKI. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat berperan dan berpengaruh signifikan dalam dunia Islam melalui organisasi ini, serta OKI dapat menjadi platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Artikel ini juga merekomendasikan beberapa hal terkait persiapan menuju Keketuaan Indonesia pada OKI pada tahun 2025.

Kata kunci: Organisasi Kerja sama Islam, Islam, politik luar negeri, Indonesia, Palestina

Latar belakang

Sejak didirikan di Rabat Maroko pada 25 September 1969, Indonesia telah terlibat dalam pembentukan Organisasi Kerja sama Islam (dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam, OKI). Ketika OKI pertama kali menyepakati piagam pendirian organisasi pada tahun 1972, Indonesia justru menolak untuk meratifikasi Piagam OKI dengan alasan Indonesia bukan negara Islam. Bahkan hingga kini (2023), Indonesia belum meratifikasi piagam OKI.

Sebagian kalangan melihat Indonesia sebagai pemimpin yang enggan atau *'reluctant leader'* dalam OKI. Menurut sejumlah pengamat, Indonesia terkesan kurang proaktif dalam mempromosikan inisiatif-inisiatif baru, serta menunjukkan kepemimpinan yang kuat di OKI dalam mengatasi berbagai tantangan besar yang muncul, seperti konflik yang berlarut-larut di Suriah serta krisis politik yang terjadi di sejumlah negara anggota OKI.

Namun sebagian kalangan lain berkeyakinan bahwa Indonesia memegang

potensi signifikan untuk menduduki posisi sebagai pemimpin alami (*natural leader*)

(Kartono, 1998). Pemimpin alami adalah pemimpin yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri. Tidak hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga Indonesia memiliki karakter dan nilai-nilai inheren Islami, seperti perdamaian dan toleransi. Pemimpin alami tidaklah diupayakan untuk menjadi pemimpin, melainkan hadir dengan alami.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dan OKI berjalan seiring dan memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh, isu Palestina—yang menyangkut kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina—telah menjadi elemen sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Alasan utama pendirian OKI adalah peristiwa pembakaran Al-Aqsa di Al Quds (Yerusalem) tahun 1969. Sejak saat itu, OKI telah memainkan peranan penting dalam mendukung hak-hak Palestina dan merumuskan posisi umat Islam internasional terhadap isu ini.

Meskipun terdapat kesamaan garis kebijakan Palestina, partisipasi Indonesia dalam OKI cenderung minimal dan sering kali kurang aktif dibandingkan dengan potensinya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan menarik mengenai pilihan kebijakan luar negeri Indonesia. Apakah OKI masih relevan dalam polugri RI? Dan bagaimana kepemimpinan dan kiprah RI pada organisasi terbesar kedua di dunia

ini?

Dalam artikel ini, penulis akan membahas transformasi OKI, kiprah Indonesia di OKI, dan potensi OKI dalam mengatasi tantangan global. Penulis juga akan menganalisis posisi Indonesia dalam OKI dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peran strategisnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Metode

Artikel ini menerapkan metode pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang peran kepemimpinan Indonesia dalam OKI. Sedangkan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.

Artikel ini menggunakan observasi dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas Indonesia di OKI ketika penulis menangani OKI di KBRI Riyadh pada 2021-2022. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer seperti resolusi dan dokumen resmi OKI, serta sumber sekunder berupa literatur ilmiah terkait isu yang dibahas.

Setelah data dikumpulkan, teknik analisis isi dan analisis kebijakan

digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak pola dan tema penting dalam data, sementara teknik analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam OKI. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang peran kepemimpinan Indonesia di OKI, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi ini.

Kerangka konseptual

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang faktor Islam dalam politik luar negeri RI dan OKI sebagai organisasi dinamis, dan selalu bertransformasi mengikuti dinamika politik global. Maka dari itu, bagian kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang peran Islam pada politik luar negeri Indonesia, OKI sebagai “*Muslim United Nations*”, dan transformasi organisasi OKI secara singkat.

Islam dan Politik Luar Negeri RI

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Islam menjadi faktor penting dalam politik domestik dan politik luar negeri Indonesia. Fearon (1998) menjelaskan bahwa pentingnya politik dalam negeri untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara secara lebih tepat.

Hal tersebut dikuatkan oleh Wolff dan Wurm (2011) yang menyoroti bahwa ide-ide spesifik perlu diakui dan dianut secara internal sebelum diproyeksikan ke luar negeri.

Banyak sarjana berpendapat bahwa pembuat keputusan kebijakan luar negeri lebih cenderung pada proses *top-down* (Skidmore, 2013), tidak mungkin mengikuti preferensi publik karena publik dipercaya tidak rasional (Sørensen, 2008). Pembuat keputusan bahkan sering mengabaikan opini publik pada saat krisis (Trumbore & Boyer, 2000). Namun, pandangan sebaliknya dikemukakan oleh Headley dan van Wyk (2012) yang mengatakan bahwa globalisasi dan revolusi teknologi informasi meningkatkan pengetahuan publik tentang urusan luar negeri, sehingga wajar untuk mencari lebih banyak pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Bagi para pemimpin kebijakan luar negeri yang otoritatif di negara-negara demokrasi, adalah penting agar kebijakan luar negeri diterima di dalam negeri, setelah menguji sentimen dalam negeri sejalan dengan dengan situasi internasional (Farnham, 2004; Gyngell, 2007).

Dalam konteks Indonesia, Anwar (1994) mengatakan bahwa faktor domestik memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998, Indonesia berusaha untuk memperluas lingkungan politik yang lebih demokratis dan terbuka.

Sejak saat itu, dengan munculnya sistem politik pasca-Suharto yang lebih demokratis, pelaksanaan hubungan internasional dan pembuatan kebijakan luar negeri lebih melibatkan berbagai aktor dalam menentukan kepentingan dan strategi kebijakan luar negeri (Anwar,2010; Hill, 2003).

Menurut Anwar (2011), di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia dan dampaknya pada politik luar negeri mendapat perhatian yang besar. SBY memperkenalkan konsep identitas internasional Indonesia sebagai negara dengan Islam, demokrasi, dan modernitas yang berjalan berdampingan. Indonesia dengan bangga menampilkan diri sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kebijakan luar negeri ini sangat relevan di tengah iklim internasional pasca-9/11, di mana persepsi umum tentang Islam cenderung negatif. Di hadapan eskalasi ekstremisme agama dan terorisme, masyarakat dunia, terutama negara-negara Barat, melihat Indonesia sebagai contoh alternatif dari Islam yang moderat.

Temuan Anwar (2011) diperkuat oleh penelitian Al Anshori (2016) yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia semakin terintegrasi dan mengakomodasi unsur-unsur Islam dan tujuan ormas Islam di Indonesia.

Sementara itu, Baihaqie (2017) berpendapat bahwa status Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar telah menjadi sumber identitas internasional Indonesia. Kedekatan antara negara dan Islam semakin meningkat, sehingga memungkinkan pengaruh Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, baik melalui tekanan kelompok muslim terhadap pemerintah maupun melalui penerimaan sukarela negara atas tujuan kelompok muslim. Ringkasnya, Al Anshori (2016) dan Baihaqie (2017) mendukung tesis Anwar (2011) dengan menggambarkan peran Islam yang semakin menonjol dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Suharto.

Nugraha (2012) mengemukakan bahwa pernyataan Presiden SBY bahwa Indonesia adalah “negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan” telah memberikan identitas baru bagi Indonesia yang menerapkan prinsip Islam Moderat dalam kebijakan luar negerinya. Ini adalah pertama kalinya Islam disebut sebagai komponen formatif dalam leksikon kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan paradigma nexusedemokrasi-Islam moderat, identitas baru sedang dibangun untuk mencita-citakan peran yang lebih signifikan, jika bukan kepemimpinan, dalam urusan dunia. Namun, keefektifan identitas baru ini akan ditentukan oleh kemampuan menangani ketegangan dan konflik di dalam dan luar negeri tanpa mengalah pada kepentingan

solidaritas seagama yang sembrono. Pada saat yang sama, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari situasi dalam negeri, namun tidak cukup diproyeksikan menjadi pemimpin di kancah internasional.

Menurut Ubaedillah (2023), di era pemerintahan Presiden Jokowi, Islam telah menjadi unsur penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, bukan hanya faktor komplementer untuk legitimasi kepentingan politik. Faktor identitas Islam tercermin dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, seperti dukungan terhadap konflik Arab Saudi-Iran, konflik Rohingya, dan perdamaian di Afghanistan, serta konsistensi dukungan terhadap Palestina.

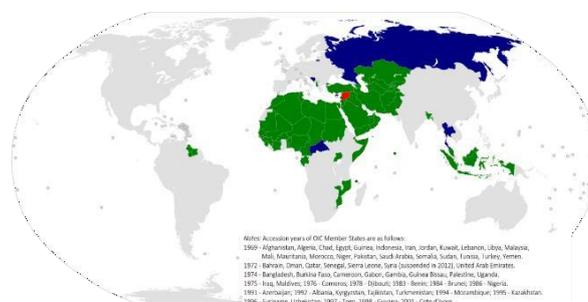
Namun, pendapat Sukma (2004) berbeda, ia berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Islam lebih berfokus pada peningkatan hubungan dengan negara-negara muslim dan mengatasi isu-isu di dunia Islam, daripada merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negeri Islam secara substansial. Persoalan identitas ganda dalam politik dalam negeri juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Islam, di mana faktor Islam lebih berfungsi sebagai "mekanisme kontrol" daripada faktor pendorong utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia

Sukma (2004) menyimpulkan bahwa terdapat batas-batas yang merintangangi ekspresi Islam dalam kebijakan luar negeri. Indonesia masih menghadapi berbagai

kendala dalam mewujudkan ambisinya untuk menjadi jembatan antara dunia Islam dan Barat serta model alternatif dalam dunia Islam. Tindakan intoleransi agama yang sering terjadi telah menodai klaim Indonesia sebagai kekuatan Islam moderat. Indonesia juga dianggap berada di wilayah pinggiran dunia Islam.

OKI sebagai “Muslim United Nations”

Dengan 57 negara anggota, OKI saat ini merupakan organisasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi ini terdiri dari negara-negara di kawasan Arab, Afrika, Asia, dan Amerika. OKI menjadikan Al Quds dan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sebab musabab (*raison d'etre*) dan kesepakatan dasar organisasi. OKI telah mengalami banyak perkembangan dalam struktur dan tugasnya selama lima dekade terakhir.



Gambar 1 peta negara anggota OKI

OKI didirikan berdasarkan keputusan KTT di Rabat, Kerajaan Maroko, pada tanggal 25 September 1969. KTT Rabat menuntut upaya lebih lanjut dari internasional, mendesak Israel untuk

menarik diri dari wilayah Arab yang didudukinya, dan mengeluarkan pernyataan serius mengutuk terorisme. Kemudian, pertemuan perdana Konferensi Menteri Luar Negeri Islam (*Council of Foreign Ministers/CFM*) diadakan di Jeddah pada tahun 1970, dan disepakati untuk membentuk sekretariat OKI yang akan dipimpin oleh sekretaris jenderal.

Pada tahun 1972, Sidang CFM ke-3 menyetujui Piagam OKI yang pertama. Piagam menguraikan tujuan dan nilai Organisasi dan tujuan utama Organisasi untuk mempromosikan persatuan dan kolaborasi di antara para anggotanya. Keanggotaan telah meningkat dari anggota awalnya 30 menjadi 57 negara dalam lima puluh tahun terakhir. Dalam rangka mengikuti perkembangan global, Piagam OKI telah diperbarui pada KTT Islam ke-11 di Dakar pada 13-14 Maret 2008, dan akan berfungsi sebagai landasan bagi aktivitas Islam OKI.

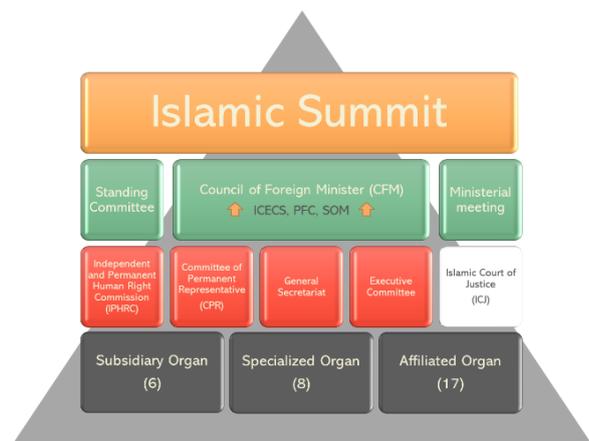
Seringkali OKI salah dipahami sebagai satu organisasi dengan berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Padahal OKI merupakan sebuah kelompok, keluarga, atau ekosistem organisasi antarpemerintah negara-negara muslim yang terdiri dari 37 organisasi, terdiri dari organisasi subsider, organisasi spesialisasi, dan organisasi alifiasi, serta Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC).

Bacik (2011) menyebut OKI dengan istilah "PBB ala Muslim" (Muslim United

Nations) untuk menggambarkan ekosistem OKI dengan tugas dan peran masing-masing.

Setiap organ OKI memiliki statuta, struktur, governing board, pimpinan, dan sekretariat yang tersebar di beberapa negara anggota. Standing committee berpusat di Al Quds Committee (Rabat), COMIAC (Dakar), COMCEC (Ankara), COMSTECH (Islamabad). Untuk badan subsider, sekretariat berlokasi di SESRIC (Ankara), IRCICA (Istanbul), IUT (Dhaka), ICDT (Casablanca), IIFA (Jeddah), ISF (Jeddah). Sementara badan spesialisasi, markas berpusat di IsDB (Jeddah), ISESCO (Rabat), IBU (Jeddah), UNA (Jeddah), ICIC (Benghazi), STIO (Islamabad), IOFS (Nur-Sultan), WDO (Cairo), IBU (Jeddah).

Struktur OKI dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Dewan Menteri Luar Negeri (*Council of Foreign Ministers, CFM*), dan Sekretariat Jenderal. KTT Islam adalah badan tertinggi OKI, yang terdiri dari para raja, kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta bertemu setiap tigatahun sekali di salah satu negara anggota. Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) adalah badan eksekutif OKI dan bertanggung jawab atas implementasi keputusan KTT. Sekretariat Jenderal bertugas untuk mendukung kerja KTT Islam dan CFM serta menjalankan tugas administratif OKI. Hingga tahun 2023, OKI telah mengadakan 14 KTT Islam dan 7 Sidang Luar Biasa.



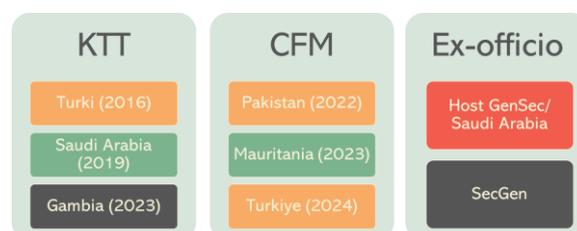
Gambar 2 ilustrasi stuktur OKI (diolah oleh Penulis)

Organ terpenting kedua OKI adalah Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Dewan secara reguler bertemu setahun sekali di salah satu Negara Anggota, tetapi Sidang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Negara Anggota atau Sekretariat Jenderal asalkan mayoritas negara anggota menyetujui permintaan tersebut. Selain itu, Dewan Menteri Luar Negeri dapat menyarankan agar diadakan pertemuan tingkat Menteri lebih lanjut untuk membahas masalah khusus yang berkaitan dengan perdagangan, bisnis, budaya, dan pariwisata. CFM terutama bertugas melaksanakan kebijakan umum KTT Islam, mengidentifikasi topik untuk KTT Islam berikutnya, meninjau keputusan dan resolusi yang diadopsi pada CFM dan KTT sebelumnya, dan mempertimbangkan dan menyetujui program, anggaran, evaluasi, dan laporan keuangan dan administrasi lainnya dari komite tetapan dalam OKI.

Sekretariat Jenderal adalah administrator OKI serta lembaga eksekutif untuk keputusan dan resolusi tertentu.

CFM memilih Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan lima tahun. Kandidat harus dinominasikan sesuai dengan prinsip distribusi geografis, rotasi, dan kesempatan yang sama untuk semua Negara Anggota. Berdasarkan keputusan CFM ke-1 (1970), Sekretariat Jenderal OKI sejatinya berada di Yerusalem, tetapi sementara ditempatkan di Jeddah hingga Yerusalem dibebaskan dari penjajahan Israel. Sejak didirikan pada tahun 1969, OKI telah memiliki 12 (dua belas) Sekretaris Jenderal.

Jika PBB memiliki Dewan Keamanan yang sangat *powerful*, OKI memiliki *executive committee* yang menentukan laju organisasi. *Executive Committee* terdiri dari Ketua KTT dan CFM saat ini, sebelum dan sesudahnya, negara tuan rumah dari Sekretariat serta Sekretaris Jenderal sebagai anggota *ex officio* (pasal 12 piagam OKI). Berikut susunan *Executive Committee* OKI saat ini:



Gambar 3 Susunan *Executive Committee* OKI 2023 (diolah oleh penulis)

Sebagai organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI memiliki cakupan geografis yang sangat luas dan beragam. Jika PBB memiliki lima bahasa resmi, OKI menerapkan tiga bahasa resmi, yaitu Inggris, Arab, dan Perancis, dalam mekanisme organisasinya. Tiga bahasa

resmi OKI mencerminkan tiga kelompok geografi yang berbeda di dalam organisasi ini. Kelompok geografis Asia menggunakan bahasa Inggris, kelompok geografis Arab menggunakan bahasa Arab, dan kelompok geografis Afrika menggunakan bahasa Perancis.

Untuk menjaga soliditas organisasi, pembentukan struktur dan pengambilan keputusan OKI memperhatikan giliran dan pertimbangan antara kelompok geografis Arab, Afrika, dan Asia. Beberapa contohnya adalah pemilihan negara tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan CFM, pemilihan Sekretaris Jenderal, Asisten Sekretaris Jenderal, dan rekrutmen staf Sekretariat, bahasa dan penyelenggara (*bureau*) konferensi, dan pemilihan anggota *governing board* badan-badan subsider.

Transformasi organisasi OKI

Transformasi OKI bergerak berlandaskan dengan peristiwa politik dan ekonomi global. Sejak didirikan tahun 1969 hingga kini, OKI menjadikan Palestina sebagai prioritas dan topik tetap pada setiap KTT dan konferensi-konferensi tingkat Menteri. Negara-negara pendiri OKI diinspirasi oleh Pan-Islam (persatuan Islam) dan prinsip non-interferensi politik domestik satu sama lain. KTT Rabat (1969) menyediakan landasan bagi pemerintah negara anggota untuk berkomitmen pada kerja sama ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual yang lebih erat dalam kerangka OKI.

Kemudian kondisi Perang Dingin di abad ke-20 juga mempengaruhi agenda OKI. KTT Islam ke-3 di Lahore (1974) berhasil menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Di bawah tekanan persaingan blok Barat dan Timur, OKI memilih kolaborasi daripada persaingan dan menolak supremasi kekuasaan hegemonik. Pada 1980-an, OKI mengembangkan kerja sama di bidang-bidang non-politik, seperti transportasi, energi, perdagangan, dan infrastruktur.

Di akhir era Perang Dingin, KTT Islam ke-6 di Dakar Senegal (1991) juga menyerukan perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi. Pada KTT yang sama, reformasi OKI mulaidicetuskan untuk mencerminkan perkembangan global dan merampingkan serta merevitalisasi prosedur kelembagaan OKI. Konferensi KTT Islam ke-6 juga menyerukan pembentukan Pasar Bersama Islam dalam jangka panjang, sebuah tujuan yang belum dapat dicapai. Perjanjian Kerangka Kerja OKI tentang Sistem Preferensi Perdagangan (*Trade Preferential System of the OIC*, TPS-OIC) diadopsi pada tahun 1990 untuk mempromosikan perdagangan intra-OKI tetapi baru dapat beroperasi pada tahun 2002 (Turbedar, 2019). Transformasi OKI terus dilakukan hingga sekarang ini agar organisasi ini tetap relevan pada abad ke-21 sekarang ini.

Namun transformasi OKI belum menyentuh pada perbaikan sumber daya

untuk menyebarkan posisi ini di luar lingkaran diplomatik atau mengimplementasikan tujuan politik global yang diinginkannya. Dengan kata lain, OKI belum dapat memenuhi tuntutan umat Islam yang populer, dan negara-negara anggota tidak mau membantu OKI secara politik dan material. Terlepas dari kekurangannya, OKI dapat menjadi aktor penting dalam hubungan internasional. Daya tarik dan kegigihannya menunjukkan bahwa umat Islam menghargai solidaritas. Cara berpikir baru tentang tatanan internasional ditunjukkan oleh aktivitas global OKI, yang menggunakan konsepsi Islam tradisional untuk membawa dunia muslim ke dalam norma-norma masyarakat internasional.

OKI telah berfungsi sebagai inkubator untuk organisasi baru di sektor-sektor di mana kebutuhan telah teridentifikasi tetapi mekanisme kolaborasi masih dirasa kurang. OKI telah menjadi forum bagi negara-negara muslim untuk memperdebatkan berbagai isu, seperti politik, ekonomi, agama, dan sosial. Meningkatkan daya saing internasional dan membangun alat keuangan alternatif telah menjadi prioritas OKI sejak awal 1990-an. Kerja sama sektoral OKI baru berkembang setelah tahun 2000 ketika banyak pertemuan tingkat menteri diadakan. Selain pariwisata, pendidikan, dan lingkungan, sesi tersebut menghasilkan komitmen yang kuat untuk memperluas kerja sama sektoral berbasis

proyek.

Sebagai organisasi yang digerakan oleh negara anggotanya (*member-driven*), OKI sangat tergantung pada kemauan politik anggotanya. OKI tidak diragukan lagi telah membantu memupuk rasa solidaritas dan kolaborasi di antara negara dan masyarakat muslim. OKI juga telah menyediakan platform bagi negara-negara muslim untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Aroman (2011) mengemukakan bahwa konsolidasi kerja sama ekonomi dapat memajukan solidaritas umat Islam. Organisasi tersebut telah berusaha mendorong kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggotanya.

Terkait hak asasi manusia, Petersen & Kayaoglu (2019) menyebutkan bahwa meskipun penentuan nasib sendiri Palestina mendorong berdirinya OKI, organisasi tersebut tidak memiliki sikap yang menyangkut masalah hak asasi manusia di tahun-tahun awalnya. Masalah hak asasi manusia jarang dibahas di KTT atau pertemuan menteri luar negeri. Pada 1990-an, OKI mulai lebih memperhatikan hak asasi manusia ketika organisasi internasional dan regional lainnya memperluas kerangka kerja hak asasi manusia internasional, tetapi tidak selalu ramah Barat. Upaya hak asasi manusia OKI ditinjau di PBB, mekanisme internal organisasi, dan tingkat negara anggota.

Terkait adanya peningkatan penistaan terhadap Islam, kelompok negara-negara

anggota OKI di PBB telah mengadvokasi Resolusi Penodaan Agama PBB. Resolusi ini salah satu cerita sukses "OIC Group" di PBB (Marshall, 2011). Dewasa ini, OKI berjuang menyampaikan wajah Islam melalui kegiatan budaya dan keterlibatan lintas agama untuk menghadapi Islamofobia, yang meningkat setelah serangan teroris 11 September 2001. Salah satu inisiatif OKI untuk menyikapi Islamofobia adalah membentuk Observatorium Islamofobia pada 2007 di bawah Sekretariat Jenderal yang diberi mandat untuk memantau tren Islamofobia, memberikan laporan berkala ke negara-negara anggota, dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Tentu OKI tidak lepas dari kritik dan kelemahan. Dalam banyak kasus, OKI sangat cepat memberikan tanggapan terhadap dinamika regional, tetapi sangat kesulitan melihat kepentingan muslim secara lebih luas. Selain itu, OKI juga terpenjara oleh persaingan sektarian Saudi-Iran. Perubahan geopolitik pasca Arab Spring di Timur Tengah telah memaksa Arab Saudi untuk meningkatkan dominasi terhadap OKI untuk melawan Iran. Praktik ini secara signifikan mengikis kredibilitas OKI sebagai aktor netral dan merusak konsep persatuan muslim

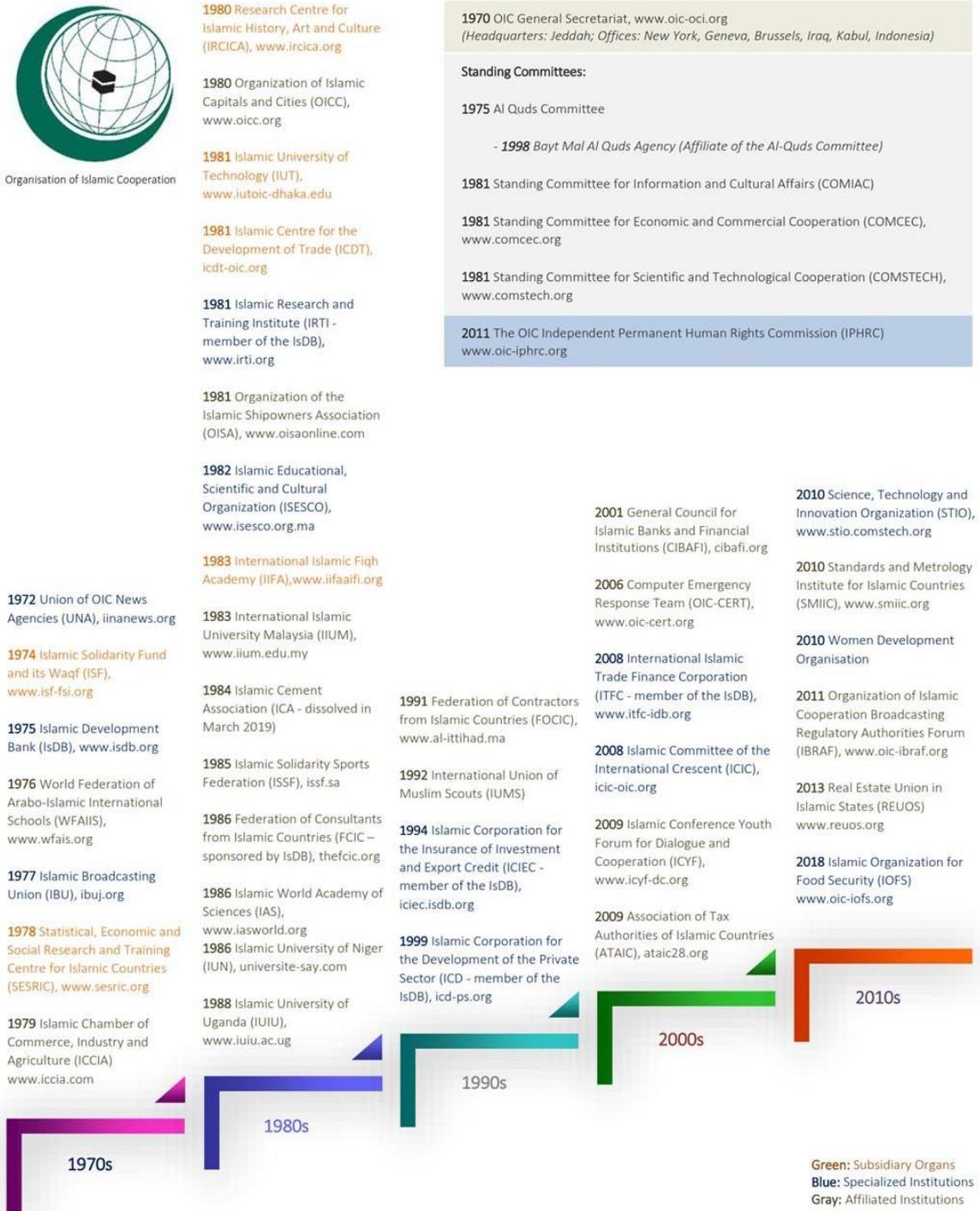
sedunia (Ahmed & Akbarzadeh, 2021).

Lebih jauh lagi, OKI dikenal aktif dalam krisis yang melibatkan muslim di negara-negara non-anggota, seperti upaya perdamaian dan muslim minoritas di provinsi perbatasan selatan Thailand (Sharqieh, 2012). OKI juga memainkan peran penting dalam proses perdamaian tripartit Mindanao antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (Ahmed & Akbarzadeh, 2021). Namun OKI lemah ketika menghadapi konflik yang melibatkan sesama negara anggota, misalnya pada Perang Teluk (1990), konflik Maroko vs. Aljazair, dan krisis diplomatik Qatar (2017).

Setelah setengah abad lebih berdiri sejak 1969, "ekosistem" OKI telah berkembang menjadi 37 organisasi, 57 negara anggota yang tersebar di 4 kawasan. OKI telah berkembang menjadi organisasi yang kompleks dengan berbagai organisasi anak perusahaan, komite tetap, dan lembaga khusus dan berafiliasi yang menangani berbagai topik seperti keamanan, intra-muslim, perdagangan, melawan Islamofobia, dan melestarikan sejarah Islam, seperti yang digambarkan oleh Turbedar (2019) di bawah ini.



Organisation of Islamic Cooperation



Gambar 4 Perkembangan lembaga OKI (Sumber: Turbedar, 2019)

Selain pertumbuhan badan-badan OKI, organisasi ini juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam wacana dan inisiatif berdasarkan resolusi yang diadopsi pada setiap sesi Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Meningkatnya jumlah resolusi yang diadopsi pada setiap sesi CFM menunjukkan transformasi organisasi OKI. Pada periode awal, resolusi OKI hanya berfokus pada isu Palestina. Saat ini, resolusi CFM terbagi menjadi beberapa topik, seperti Politik, Administrasi, dan Keuangan (AF), Budaya, Ekonomi, Organisasi, Hukum, Minoritas Muslim (MM), Palestina (Pal), Sains dan Teknologi (S&T), Program Aksi (POA), Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), dan International Cooperation and Humanitarian Affairs Department (ICHAD). Berikut ini adalah daftar resolusi yang diadopsi oleh setiap CFM.

Diskusi/Analisis

Dalam studi yang dilakukan oleh Wirajuda (2014) tentang kebijakan luar negeri Indonesia pasca Suharto menunjukkan bahwa preferensi para pengambil kebijakan luar negeri yang otoritatif (Presiden dan Menteri Luar Negeri) tetap sangat dominan, sedangkan aktor lainnya hanya berperan terbatas dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Temuan Wirajuda (2014) ini menegaskan penelitian Hill (2003) sebelumnya mengenai masih dominannya

peran kepala pemerintahan dan menteri luar negeri dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di negara demokrasi.

Di bawah ini akan dianalisis kiprah Indonesia di OKI. Indonesia memiliki peran penting dalam OKI sejak awal pendirian organisasi tersebut. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program OKI. Namun, seiring dengan perubahan politik dan sosial domestik, kiprah Indonesia di OKI juga mengalami perubahan.

Orde Baru dan Reformasi (1969-2004)

Pada masa Orde Baru, Indonesia hadir pada KTT Rabat tahun 1969 yang menyepakati pendirian Organisasi Konferensi Islam (kelak pada 2011 berubah nama menjadi Organisasi Kerja sama Islam). Selanjutnya, Menlu RI Adam Malik memimpin delegasi untuk menghadiri CFM pertama di Jeddah, Arab Saudi, pada 23 Maret 1970 (Fachir, 2015). Pada CFM pertama ini disepakati struktur, mekanisme, dan piagam OKI pertama, serta menunjuk Sekjen OKI pertama, yaitu Tunku Abdul Rahman (PM Malaysia 1957-1970).

Walaupun sebagai pendiri OKI, Indonesia tidak menyetujui untuk menandatangani Piagam OKI ketika pertama kali terbit pada tahun 1972 dengan alasan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dan merasa bahwa negara-negara Arab mendominasi organisasi ini. Akibatnya, Indonesia semakin menjauh

dari isu-isu dunia Islam karena situasi politik domestik yang ada. Namun, pada awal 1990-an, Indonesia mulai memperbarui partisipasinya dalam OKI (Perwita, 2003).

Pada tahun 1991, Presiden Suharto pertama kali hadir dalam KTT OKI yang digelar di Dakar, Senegal. Presiden Suharto menyampaikan pidato sepanjang 38 (tiga puluh delapan) halaman yang mengulas tentang perubahan besar dunia pasca Perang Dingin dan kebangkitan kembali multilateralisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan Asia Afrika dan dunia Islam di antaranya penghapusan apartheid di Afrika Selatan, berakhirnya Perang Teluk, dan kembali bersatunya Yaman. Presiden Suharto juga menyinggung Konferensi Madrid untuk konflik Israel-Palestina dan isu Jammu dan Khasmir.

Hal menarik pada pidato Presiden Suharto pada KTT OKI di Dakkar adalah Indonesia tampil percaya diri, meskipun Kepala Negara baru pertama kali hadir di KTT. Kehadiran Presiden Suharto pada KTT OKI di Dakar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin memperkuat perannya di OKI. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin terbuka terhadap kerja sama dan komunikasi dengan negara-negara muslim lainnya di dunia.

Pada kesempatan itu, Indonesia berbagi inisiatif-inisiatif melalui platform OKI, seperti panduan Keluarga Berencana

bagi negara muslim, kerja sama pertanian, dan tatanan ekonomi internasional baru, sebagaimana kutipan berikut:

OKI mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kerjasama Selatan-Selatan. Dalam hubungan inilah, kita harus menggali dan meningkatkan semua sarana dan kerjasama. melalui perangkat Komite Tetap untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan (COMSEC). Kita hendaknya mendukung upaya untuk meninjau kembali dan menyesuaikan Rencana Aksi OKI dan agar COMSEC mengusahakan perumusan dan pelaksanaan strategi dalam kerangka perencanaan, sejalan dengan adanya perubahan tatanan ekonomi internasional baru. Kita haruslah berupaya mendayagunakan sepenuhnya segala potensi untuk meningkatkan dan memperbaharui kerjasama dalam Badan-badan OKI yang telah ada, seperti Bank Pembangunan Islam. Indonesia juga mengharapkan agar dalam bidang perdagangan, jaringan kerjasama informasi perdagangan di antara negara-negara Islam (TINIC) dijadikan sarana untuk meningkatkan perdagangan. (Naskah Presiden Suharto pada KTT OKI Senegal)

Presiden Suharto menutup pidatonya dengan mengutarakan kecermatan membaca peluang perubahan pasca Perang Dingin untuk tujuan perbaikan-perbaikan organisasi OKI, seperti tergambar pada kutipan pidato berikut:

Di tengah-tengah perubahan dinamis dalam hubungan internasional dewasa ini, maka penting sekali bagi anggota OKI. untuk meninjau kembali hasil karya organisasi kita dan kemampuan bagian-bagiannya. Tujuannya adalah untuk lebih memperkuat kegunaannya ke luar maupun efisiensinya ke dalam. Pertemuan puncak ini kiranya dapat merupakan kesempatan awal yang baik.dari proses yang panjang untuk mencapai tujuan kita. Indonesia mengharapkan agar dalam Pertemuan Puncak ini dapat dilakukan tukar pandangan yang jujur dan menyeluruh mengenai masalah ini. Saya percaya bahwa dengan bekal nilai-nilai spiritual Islam yang tinggi, dan solidaritas Islam serta kesadaran akan persamaan nasib, tujuan bersama Pertemuan Puncak di bawah pimpinan Yang Mulia, Insya Allah, akan dapat dicapai.
(Naskah Presiden Suharto pada KTT OKI Senegal)

Kepercayaan diri Indonesia untuk memberikan masukan perbaikan organisasi pada OKI menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan

penduduk muslim terbesar di dunia, memegang peran penting di kalangan dunia Islam. Terlepas dari perannya yang terbatas selama masa Orde Baru, Indonesia tetap dianggap sebagai *natural leader* di kalangan negara anggota OKI. Hal ini terlihat dari kepercayaan diri Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Indonesia juga mampu mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan budaya.

Keterlibatan Indonesia di OKI semakin meningkat pada tahun 1996 ketika Indonesia menjadi tuan rumah *Council of Foreign Minister* (CFM) ke-24 OKI di Jakarta, menjadi bagian dari *Executive Committee*, dan memimpin sidang-sidang OKI. Sebagai *natural leader*, Indonesia memiliki *credential*, *power*, dan tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan isu-isu strategis di dunia muslim.

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia menjadi tuan rumah pada berbagai konferensi tingkat menteri, antara lain:

- a. Sidang ke-2 Menteri Pos dan Telekomunikasi OKI, Bandung, 7 November 1991.
- b. Sidang Komite OKI ke-9 Bidang Dakwah, Jakarta, 24 Januari 1995.
- c. Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri ke-24 OKI, Jakarta, 9 Desember 1996.

- d. Muktamar VI Menteri Wakaf dan Urusan Islam OKI, Jakarta, 29 Oktober 1997.

Pada periode Orde Reformasi, peran Indonesia di OKI menurun karena Indonesia mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial yang serius. Namun, setelah berhasil mengatasi krisis tersebut dan meningkatkan kredibilitasnya di mata negara-negara OKI, Indonesia terus meningkatkan perannya dalam OKI. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat menghadiri KTT OKI ke-9 di Doha, Qatar pada tahun 2000 menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi antar negara anggota OKI. Gus Dur juga mendorong OKI untuk turut memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Indonesia juga aktif dalam kegiatan OKI. Pada KTT OKI ke-10 di Malaysia pada tahun 2003, Megawati menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya kerja sama antar negara anggota OKI dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Pada awal masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkenalkan konsep identitas internasional Indonesia, yaitu sebagai

negara di mana Islam, demokrasi, dan modernitas hidup berdampingan. Keunikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki relevansi khusus dalam iklim internasional pasca-9/11, di mana persepsi terhadap Islam secara umum negatif. Di tengah meningkatnya ekstremisme agama dan terorisme, masyarakat global, terutama negara-negara Barat, telah menoleh kepada Indonesia untuk memberikan wajah alternatif bagi Islam (Anwar, 2011).

Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia memperkuat hubungan dengan OKI dan meningkatkan perannya di OKI. SBY dicatat sebagai Presiden Indonesia yang paling rutin menghadiri KTT OKI. Pada KTT ke-11 di Dakar (2008), untuk pertama kalinya, Indonesia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah KTT OKI, tetapi belum tercapai pada masa pemerintahan SBY.

SBY juga menempatkan isu-isu global dan regional sebagai agenda utama dalam hubungan Indonesia dengan OKI. Pada saat itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam isu terorisme, pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di dunia muslim. Indonesia juga mempromosikan dialog antaragama dan kerja sama ekonomi antar negara-negara OKI. Pada tahun 2011, Indonesia terlibat aktif dalam pemilihan Sekjen OKI yang diadakan secara demokratis hingga

terpilih Ekmeleddin İhsanoğlu dari Turki.

Indonesia pada era SBY menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri OKI, antara lain *the 1st OIC International Forum on Islamic Tourism*, Jakarta, 2-3 Juni 2014 dan *the 4th Ministerial Conference on Women's Role in the Development of OIC Member States*, Jakarta, 4 Desember 2012.

Pada tahun 2016, Sekretaris Jenderal OKI memilih mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menjadi salah satu anggota *Wise Persons Council* (WPC) OKI. Hal ini disebabkan oleh kedekatan pemikiran SBY dengan isu dunia muslim. WPC merupakan sebuah dewan yang terdiri dari para pemimpin bijak dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan peran OKI dalam penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik melalui diplomasi preventif, promosi dialog, dan mediasi.

WPC terdiri dari mantan kepala negara Indonesia (SBY), Turki (Abdullah Gul), dan Nigeria (Abdulsalami Abubakar), serta sejumlah menteri negara anggota OKI. Pembentukan WPC ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa pada tahun 2016, sebanyak 61% konflik bersenjata terjadi di negara anggota OKI, baik yang dimotivasi oleh ideologi maupun keinginan untuk membangun sistem politik baru, seperti Aljazair (AQIM), Nigeria (Boko Haram), Somalia (al-Shabaab), Afghanistan dan Pakistan (al-Qaeda dan

Taliban), Yaman (AQAP dan al-Houthis), Irak (ISIS) dan Suriah (ISIS dan Front al-Nusra).

WPC diharapkan dapat menggunakan pengalaman dan jasa baiknya untuk melakukan diplomasi preventif dan mendukung dialog, mediasi, dan negosiasi di antara pihak-pihak yang berkonflik di dunia muslim. Dengan keanggotaan WPC, pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam penanganan konflik dan deradikalisasi semakin diperkuat. Indonesia telah berhasil menghadirkan sebuah model deradikalisasi yang baik sejak peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Indonesia telah mengubah pola pendekatan tindakan koersif menjadi pendekatan yang lebih humanis, deradikalisasi ideologi, dan moderasi Islam, meskipun dukungan SDM dan pendanaan relatif rendah.

Dalam hal ini, Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk memperkuat keanggotaannya di OKI dan berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia muslim. Hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat diplomasi preventif, yaitu upaya untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Sebagai anggota WPC, Indonesia memiliki peluang untuk lebih aktif dan efektif dalam mendorong upaya pencegahan konflik di duniamuslim.

Masa Pemerintahan Jokowi (2014-sekarang)

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia terus berperan aktif dalam OKI. Salah satu fokus utama Indonesia dalam OKI adalah membantu menyelesaikan konflik Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi salah satu negara pendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan ini menunjukkan dukungan kuat Indonesia terhadap hak Palestina atas kota suci tersebut dan menegaskan bahwa solusi konflik harus didasarkan pada hukum internasional yang berlaku. Selain itu, Indonesia juga membuka Konsul Kehormatan di Kota Ramallah, Tepi Barat, pada tahun 2019 untuk memperkuat dukungan politik dan ekonomi bagi rakyat Palestina.

Indonesia aktif dalam berbagai aktivitas OKI, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Palestina, dan Israel. Pada tahun 2018, Indonesia membawa isu Rohingya ke CMF ke-45 yang akan diselenggarakan di Dhaka, Bangladesh dan menghasilkan Resolusi Nomor 59/45-POL tentang Pembentukan Komite Menteri Ad Hoc OKI untuk Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingnya. Melalui resolusi ini, semua negara anggota OKI diharapkan dapat bekerja sama untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis

minoritas Rohingya di Myanmar.

Selain itu, Jokowi juga mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, pada tahun 2018 untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jokowi menyebut pengungsi Rohingya sebagai "saudara muslim" dan Indonesia berjanji akan membantu mereka. Sebelumnya pada tahun 2015, Jokowi berhasil memobilisasi bantuan keuangan sebesar US\$50 juta dari negara-negara anggota OKI untuk Rohingya. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia mengajak negara-negara anggota OKI untuk memberikan perhatian khusus terhadap krisis Rohingya dan mendukung proposal Indonesia untuk melakukan keterlibatan yang konstruktif (Ubaedillah, 2023).

Puncak keterlibatan Indonesia pada OKI terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, yaitu untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bersama negara-negara anggota OKI meluncurkan "Deklarasi Jakarta" yang berisi rekomendasi solusi untuk Palestina dan al-Quds al-Syarif. Jokowi menekankan pentingnya solidaritas dan soliditas antar negara anggota OKI untuk mendukung perjuangan Palestina.

Presiden Jokowi juga menghadiri Pertemuan Luar Biasa OKI ke-6 pada Desember 2017 untuk menanggapi pemindahan Kedutaan Besar AS ke

Yerusalem. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam forum PBB terkait isu Palestina, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada Juni 2018. Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan dokumen-dokumen (*penholder*) terkait isu-isu dunia Islam seperti Palestina dan Afghanistan. Sebagai ketua Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019, Indonesia menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam kepemimpinan internasional untuk perdamaian dunia melalui tema "*Investing in Peace*". Pada tahun ke-3 kepemimpinannya, Jokowi juga menunjuk Maha Abou Susheh sebagai Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah guna menguatkan kehadiran Indonesia di Palestina.

Peningkatan aktivitas Indonesia pada OKI pada masa Jokowi juga ditandai dengan penunjukan Dr. Alwi Shihab (Menteri Luar Negeri RI, 1999 – 2001) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI (UKP TTOKI). Lebih jauh lagi, secara resmi, Indonesia juga pertama kali memiliki Wakil Tetap RI untuk OKI yang dirangkap oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel yang menyerahkan Letter of Introduction kepada Sekjen OKI pada April 2016.

Terobosan lain pada masa Jokowi adalah dengan menginisiasi pembentukan OIC Contact Group on Peace and Dialogue (OIC CGPD) pada pertemuan

KTT Islam ke-13 di Istanbul pada bulan April 2016. Awalnya, CGPD dibentuk untuk membangun strategi solusi atas masalah yang dihadapi oleh negara-negara dunia Islam. Namun, pada perkembangannya, CGPD diberi mandat untuk menguatkan upaya pencegahan diskriminasi agama, Islamofobia, intoleransi, dan kebencian terhadap umat muslim saat terjadi serangan teror terhadap Masjid di Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019.

Melalui CGPD, Indonesia mendorong OKI untuk bekerja sama dengan PBB dan Uni Eropa dalam pemantauan dan pelaksanaan dialog konstruktif terhadap isu Islamofobia. CGPD menjadi forum anggota OKI untuk membahas isu-isu non-tradisional yang sulit mendapatkan tempat pada struktur formal OKI dan menjadi forum pertemuan negara anggota OKI untuk mencari titik temu pada isu sensitif tanpa hambatan politis. Pada Juli 2019, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perdana CGPD di Jakarta. Pada pertemuan ini, Indonesia berhasil memasukan prinsip Islam moderat melalui dokumen keluaran CGPD yang disebut *Plan of Action on Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred Towards Muslims 2020-2023* yang menjadi patokan seluruh dunia.

Pada tanggal 15 Maret 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang disponsori oleh kelompok negara anggota OKI di PBB, yang menetapkan 15 Maret

sebagai *International Day to Combat Islamophobia*. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati tragedi serangan teroris berupa penembakan massal di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Dokumen Plan of Action menekankan bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun. Resolusi ini menyerukan dialog global tentang promosi budaya toleransi dan perdamaian, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keragaman agama dan kepercayaan. Dengan demikian, *International Day to Combat Islamophobia* menjadi bukti bahwa kelompok OKI di PBB adalah kelompok terbesar di PBB yang berpengaruh dan efektif untuk mendorong satu isu yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, terobosan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota OKI memiliki peran penting di kancah internasional.

Reluctant or natural leader?

Uraian tentang kiprah Indonesia di OKI dari waktu ke waktu menunjukkan Indonesia adalah *natural leader* di kalangan dunia muslim. Sebagai negara muslim terbesar di dunia dan anggota G20, suara Indonesia didengar dan seringkali menjadi penentu bagi inisiatif baru dan perbaikan organisasi OKI.

Namun demikian, Indonesia seringkali tampak 'setengah hati' (*reluctant*) untuk

aktif di OKI. Hal ini terlihat dari beberapa hal, antara lain, pertama, Indonesia belum meratifikasi piagam OKI hingga saat ini padahal termasuk pendiri organisasi. Alasan yang sering disampaikan mengapa Indonesia belum meratifikasi piagam OKI adalah karena Indonesia bukan negara Islam.

Dikatakan dalam sejumlah literatur bahwa piagam OKI menyebutkan anggota OKI adalah negara-negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, Indonesia menolak untuk menandatangani Piagam OKI 1972 (seperti Suryadinata, 1995; Rosyadi, 1981). Padahal keanggotaan OKI tidak mensyaratkan Islam sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Piagam OKI 1972, sebagai berikut:

The Organization of the Islamic Conference is made up of the States which took part in the Conference of Kings and Heads of State and Government held in Rabat and the two Foreign Ministers conferences held in Jeddah and Karachi, and signatory to the present Charter. Every Muslim State is eligible to join the Islamic conference on submitting an application expressing its desire and preparedness to adopt this Charter (article VIII OIC Charter 1972).

Berdasarkan Piagam OKI 1972 tersebut, Indonesia termasuk 25 negara

awal yang hadir pada KTT Rabat, CFM ke-1 di Jeddah (1970), dan CFM ke-3 di Jeddah (1972). Lebih jauh lagi, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia masuk dalam kriteria 'Muslim State' bukan 'Islamic State'.

Bacik (2011) mengatakan bahwa OKI memiliki dua kelemahan struktural yang mengakibatkan OKI kurang berfungsi, yaitu aturan keanggotaan yang tidak informatif dan kurangnya badan eksekutif. Kritik Bacik (2011) ini antara lain disebabkan karena kriteria keanggotaan OKI yang kurang jelas. Bahkan Islam bukan agama mayoritas di beberapa anggota OKI, seperti Suriname, Benin, Togo, Guyana, Gabon, dan Uganda. Di sisi lain, beberapa negara dengan jumlah populasi muslim besar tidak dapat menjadi anggota OKI karena sebab politis, seperti Israel, India, Russia, dan Tiongkok.

Maka dari itu, pada KTT Islam ke-11 di Dakar (2008), Piagam OKI diamandemen dengan memberikan syarat keanggotaan yang lebih spesifik, yaitu anggota PBB dan mayoritas muslim, sebagai berikut:

Any State, member of the United Nations, having muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organisation if approved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the

Council of Foreign Ministers. (Article 3, OIC Charter 2008)

Sejak Piagam OKI 2008 disahkan hingga saat ini, OKI belum menerima anggota baru. OKI terakhir menerima Pantai Gading sebagai anggota tahun 2001.

Di samping itu, syarat minimal piagam OKI berlaku akan diratifikasi oleh dua pertiga dari 57 anggota atau 38 anggota (Article 36, OIC Charter 2008). Memang ratifikasi Indonesia tidak dibutuhkan untuk membuat piagam OKI berlaku (come into force), tetapi menunjukkan reluctance Indonesia terhadap OKI.

Kedua, Indonesia reluctant dengan OKI ditunjukkan dengan tunggakan iuran Indonesia kepada OKI dan badan-badan subsider. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab, menyampaikan bahwa tunggakan Indonesia di OKI cukup besar dan membuat malu (Tabloid Diplomasi, April 2011). Secara unilateral, Indonesia hanya membayar iuran pada Sekretariat OKI, IPHRC, dan SESRIC, tetapi berhenti membayar iuran pada badan-badan subsider OKI lainnya, karena dinilai tidak memberikan manfaat optimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional wajib memiliki manfaat kualitatif (ideologi, politik, ekonomi dan

pembangunan, sosial budaya, perdamaian dan keamanan internasional, kemanusiaan, lingkungan hidup) dan manfaat kuantitatif (jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik, partisipasi kegiatan, bantuan, nilai program pembangunan, dan jumlah warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional).

Apabila ditimbang nilai kemanfaatan badan-badan subsider OKI bagi Indonesia seperti International Islamic Fiqh Academy (IIFA), Islamic Solidarity Fund (ISF), dan Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) berdasarkan Perpres 30/2019, maka dapat diperkirakan bahwa manfaatnya adalah sangat besar apabila Indonesia aktif di dalamnya. Namun di badan-badan subsider tersebut, diinformasikan bahwa Indonesia masih menunggak iurannya.

Secara kualitatif, Indonesia dapat memperluas jaringannya dengan para ahli fiqih dari berbagai mazhab di seluruh dunia melalui keanggotaannya di IIFA. IIFA adalah organisasi fikih terbesar di dunia yang mewadahi 57 ulama wakil dari negara-negara anggota OKI dan secara berkala menyelenggarakan seminar mengenai fatwa dan pandangan terhadap isu-isu terkini, menerbitkan jurnal dan publikasi, serta proyek ilmiah seperti ensiklopedia hukum Islam. Meskipun IIFA tidak hanya memfokuskan pada kaidah fikih tradisional, tetapi juga berperan strategis dalam menentukan kaidah fikih kontemporer, seperti zakat untuk

pengungsi (UNHCR), pemberantasan terorisme dan ekstremisme, persaudaraan Sunni-Syiah, vaksin Covid-19, dan etika penelitian medis (transplantasi organ, kematian otak, puasa untuk orang diabetes).

Namun, sayangnya, selama dua dekade terakhir, Indonesia tidak memiliki wakil pada Dewan IIFA. Pada tahun 1983, Indonesia sangat aktif di Dewan IIFA dengan wakil Dr. Ahmad Azhar Basyir (yang pernah menjabat Ketum PP Muhammadiyah 1990-1995), dan dilanjutkan oleh Prof. Satria Effendi (1996-2000). Padahal kehadiran wakil Indonesia pada Dewan IIFA sangat bernilai strategis karena dapat mewakili khazanah pemikiran mazhab Syafii dan Muslim Nusantara. Selain itu, keaktifan Indonesia kembali pada Dewan IIFA juga bernilai strategis untuk memperkaya pemikiran negara anggota OKI dengan Islam moderat ala Indonesia, serta menjadi lokomotif pemikiran fikih tentang instrumen keagamaan kontemporer, seperti Badan Wakaf, Gerakan Wakaf Uang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai sovereign welfare fund.

Adapun manfaat yang diperoleh Indonesia dari ISF lebih dirasakan secara kuantitatif. Berdasarkan data dari Sekretariat ISF, total nilai bantuan ISF kepada Indonesia sebesar USD 3,241,000 terbagi dalam 64 proyek pada kurun waktu 1976—2020 kepada sejumlah universitas, lembaga pendidikan Islam lain, yayasan

dan pondok pesantren di Indonesia, antara lain Univ. Muhammadiyah Malang, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Airlangga, Universitas Riau. Universitas Sultan Agung, Universitas YARSI, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Ibnu Sina, Dewan Tinggi Dakwah Islam, Himpunan Mahasiswa Muslim dan Himpunan Guru Islam.

Indonesia terpilih sebagai governing board ICDT mewakili kelompok Asia untuk periode 2022 – 2024. Melalui ICDT, Indonesia dapat meraup keuntungan dengan memperluas akses pasar produk ekspor unggulan, mempromosikan, dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Anggota OKI yang dikategorikan sebagai pasar non-tradisional.

Ketiga, partisipasi minimal Indonesia di OKI disebabkan karena terdapat pandangan bahwa OKI didominasi oleh Arab Saudi atau isu-isu Timur Tengah semata. Sebagai organisasi yang digerakan oleh anggotanya (members-driven), OKI sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh negara-negara anggota yang aktif dibandingkan anggota yang tidak aktif. Memang tidak dapat dipungkiri, Arab Saudi adalah tuan rumah Sekretariat OKI di Jeddah sehingga otomatis menjadi anggota *Executive Committee* tetap OKI. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, OKI bukan hanya satu organisasi, tetapi merupakan kelompok/ekosistem 37 organisasi

antarpemerintah muslim dengan sekretariat yang tersebar di negara-negara anggota. Selain itu, resolusi-resolusi CFM setiap tahunnya menunjukkan keberagaman isu dan kawasan, seperti Jammu-Kashmir, Sahel region, muslim minoritas di Thailand dan Filipina, Myanmar, Covid-19, lingkungan hidup dan sumber daya air, hak perempuan, hingga sinematografi.

OKI juga sering dianggap sebagai kelompok negara berkembang sehingga Indonesia tidak perlu terlalu aktif. Anggapan keliru ini menafikan kenyataan bahwa OKI merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, dengan tiga anggota OKI yang merupakan anggota G20 (Indonesia, Arab Saudi, dan Turkiye), dan beberapa anggota OKI merupakan negara dengan GDP perkapita terbesar di dunia (Qatar, PEA, Brunei, dan Bahrain).

Kesimpulan

OKI telah menjadi bagian dalam politik luar negeri Indonesia yang juga merupakan salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam organisasi ini. Namun, seiring dengan perubahan dinamika politik dan geostrategi regional dan global, pertanyaan muncul tentang apakah Indonesia sebagai *natural* atau *reluctant leader* dalam OKI.

Posisi dan keaktifan Indonesia dalam OKI masih menjadi perdebatan dengan alasan Indonesia bukan negara Islam, OKI didominasi oleh Arab Saudi dan isu Timur Tengah, dan OKI dianggap sebagai organisasi kelompok negara berkembang yang tidak efektif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak relevan dan fakta membuktikan sebaliknya. OKI tidak pernah mensyaratkan anggota berbentuk negara Islam, OKI sebagai *member-driven organization* sangat dipengaruhi oleh anggota-anggotanya yang aktif, dan *grouping* OKI di PBB terbukti efektif mengusung isu-isu bersama. Penting juga dipahami bahwa OKI bukan satu organisasi dengan Sekretariat di Jeddah. Melainkan kelompok/ekosistem yang terdiri dari 37 organisasi dengan struktur, statua, dan sekretariat yang tersebar di negara-negara anggota OKI.

Terdapat beberapa poin penting mengapa OKI masih dan sangat relevan bagi kepentingan nasional Indonesia. Pertama, isu kemerdekaan Palestina salah satu prioritas polugri RI. Sebagai negara yang menentang penjajahan, Indonesia selalu menjadi negara yang paling keras membela Palestina di luar kawasan Timur Tengah. Sementara pembakaran Al-Quds oleh Israel adalah sebab utama didirikannya OKI padatahun 1969.

Kedua, Indonesia mengedepankan pendekatan multilateralisme dalam

polugrinya. OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 anggota yang tersebar di kawasan Arab, Asia, Afrika, dan Amerika. Sebagai anggota OKI terbesar, Indonesia dapat memperjuangkan isu-isu penting di forum internasional dan memperkuat posisinya sebagai negara yang memperjuangkan multilateralisme dalam memperjuangkan dan menyeimbangkan dan isu-isu yang berkaitan dengan dunia muslim, seperti isu Palestina serta isu minoritas muslim di Asia Tenggara. Dalam konteks globalisasi dan multilateralisme, partisipasi aktif Indonesia di OKI juga dapat meningkatkan posisi dan pengaruh RI di tingkat internasional. Melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara muslim di seluruh dunia, Indonesia dapat mempromosikan kepentingan nasionalnya dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan penting di tingkat global.

Ketiga, Indonesia memiliki kredensial untuk berbicara tentang komabilitas Islam dan demokrasi. Agenda politik luar negeri Indonesia dan OKI memiliki banyak kesamaan, seperti isu Palestina, Islamophobia, demokrasi, perdamaian, dan dialog. Sebagai negara dengan identitas politik luar negeri yang sejalan dengan OKI, Indonesia dapat berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan negara-negara muslim.

Keempat, RI menerima manfaat kuantitatif dan kualitatif dengan aktif di OKI. Selain dapat memperjuangkan isu-isu penting bagi umat muslim, Indonesia juga menerima manfaat kuantitatif dan kualitatif dari OKI. OKI memiliki badan-badan subsider, afiliasi, dan spesialisasi seperti Islamic Development Bank, Islamic Solidarity Fund, SESRIC, dan lain-lain yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa OKI memiliki kedudukan strategis bagi RI dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. OKI juga memberikan manfaat kuantitatif dan kualitatif bagi Indonesia. Sebagai anggota OKI, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam organisasi ini dan memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan negara-negara muslim di seluruh dunia, termasuk isu Palestina, agresi Israel, Islamophobia, Rohingya, dan lain-lain. Selain itu, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dapat memanfaatkan OKI sebagai platform untuk mempromosikan identitas muslim yang moderat dan toleran di tingkat internasional.

Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa OKI bukan tanpa kritik. Indonesia harus tetap kritis dan proaktif dalam OKI. Indonesia harus terus mendorong OKI agar lebih efektif dan efisien dalam memperjuangkan isu-isu strategis dan mengatasi masalah

organisasi, khususnya organ-organ yang tidak efektif. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan OKI secara optimal untuk kepentingan nasional, kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara muslim di dunia. OKI merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia.

Rekomendasi

Setelah sukses menggelar KTT G20 (2022) dan KTT ASEAN (2023), Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah KTT ke-16 OKI pada tahun 2025 atau dua tahun setelah Gambia menggelar KTT ke-15 pada bulan Desember 2023. Pasca KTT Gambia, Indonesia akan masuk ke dalam jajaran Executive Committee OKI sebagai calon tuan rumah KTT (sistem troika). Selanjutnya, setelah menyelenggarakan KTT ke-16 OKI (2025), Indonesia akan menduduki posisi sebagai Ketua Executive Committee atau Ketua OKI selama dua atau tiga tahun ke depan. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu wajib mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan suksesnya hajatan besar ini sekaligus memimpin dunia muslim selama dua tahun.

Persiapan yang dibutuhkan meliputi

infrastruktur, modalitas, dan substansi diplomasi yang matang dan efektif agar KTT OKI tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan dunia muslim. Sebagai Ketua OKI, Indonesia akan memimpin negara-negara anggota untuk merespon berbagai isu dunia secara cepat dan solutif. Oleh karena itu, persiapan yang matang akan sangat penting untuk menjamin kesuksesan KTT OKI di Indonesia.

Infrastruktur diplomasi RI di OKI telah diperkuat dengan memindahkan kewenangan OKI dari KBRI Riyadh ke KJRI Jeddah (Permenlu 16/2022) dan menunjuk Konsul Jenderal RI Jeddah sebagai Wakil Tetap RI untuk OKI, dan menambah staf diplomatik untuk menangani OKI di KJRI Jeddah. Namun perlu juga dipersiapkan pendirian Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk OKI di Jeddah sebagai full-fledge and independent mission lengkap dengan mandat, staf, dan logistiknya.

Di samping itu, penting juga disiapkan WNI yang ditempatkan (secondment) atau bekerja di Sekretariat OKI dan badan-badan subsider, spesialisasi, dan afiliasi yang menjadi prioritas nasional. Perlu juga dipertimbangkan untuk peningkatan struktur penanganan OKI di Pusat. Sebagai perbandingan penanganan OKI ditangani oleh setingkat pejabat eselon I di Arab Saudi, Pakistan, Turkiye, dan Malaysia. Wacana pembukaan Kantor OKI

Regional Asia di Jakarta perlu dikongkritkan untuk men-generate lebih banyak manfaat bagi Indonesia, kontribusi nyata Indonesia bagi kemajuan organisasi.

Dalam rangka Keketuaan Indonesia di OKI, persiapan modalitas diplomasi perlu dipersiapkan, antara lain ratifikasi piagam OKI dan pembayaran tunggakan iuran. Terdapat insentif potongan tunggakan kontribusi sebesar 75% ini berlaku selama 4 (empat) tahun anggaran sejak 2021 (resolusi 2/47 AF). Substansi diplomasi juga menjadi faktor penting untuk menjadikan KTT OKI sebagai ajang yang produktif dan solutif. Indonesia harus memastikan bahwa agenda KTT OKI mencakup isu-isu penting yang relevan bagi kepentingan nasional dan mampu memberikan solusi konkret atas dunia Islam, seperti Palestina dan muslim minoritas.

Dengan persiapan infrastruktur, modalitas, dan substansi diplomasi yang matang, Indonesia diharapkan mampu menggelar KTT OKI tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merespon isu-isu penting dunia Islam.

Daftar pustaka

- Ahmed, Z. S., & Akbarzadeh, S. (2021). Sectarianism and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). *Territory, Politics, Governance*, 9(1), 76–93. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1643779>
- Al Anshori, M. Z. (2016). *The role of Islam in Indonesia's contemporary foreign*

- policy. [Doctoral Dissertation, Victoria University of Wellington]
- Anwar, D. F. (1994). Indonesia in ASEAN: foreign policy and regionalism: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Anwar, D. F. (2010). The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy. *Southeast Asian Affairs*, 2010(1), 126-141. doi:10.1355/SEAA10H
- Anwar, D. F. (2011). Foreign policy, Islam and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3, 37-54.
- Aroman, B. (2011). *Organization of Islamic conference: Genesis & development with special reference to Political & Educational policies (1969-91)*. <http://ir.amu.ac.in/12885/1/T8269.pdf>
- Bacik, G. (2011). The genesis, history, and functioning of the Organsuryaization of Islamic Cooperation (OIC): A formal-institutional analysis. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 31(4), 594–614. <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.630864>
- Baihaqie, A. (2017). Islam and Indonesian foreign policy under the Yudhoyono presidency/ Akhmad Baihaqie (Doctoral dissertation, University of Malaya).
- Fachir, A.M., (2015). Menapaki Jejak Dua Saudara: Potret Hubungan Indonesia-Arab Saudi. Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh.
- Farnham, B. (2004). Impact of the Political Context on Foreign Policy Decision-Making. *Political Psychology*, 25(3), 441-463. doi:10.1111/j.1467-9221.2004.00379.x
- Fearon, J. D. (1998). Domestic politics, foreign policy, and theories of international relations. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 289-313.
- Gyngell, A. (2007). Making Australian foreign policy (2nd [fully rev. and upd.] ed.. ed.): New York, NY etc. : Cambridge University Press.
- Headley, J., & van Wyk, J.-A. (2012). Debating the Public's Role in Foreign Policy *Public Participation in Foreign Policy* (pp. 3-20): Springer.
- Hill, C. J. (2003). The changing politics of foreign policy: Basingstoke etc. : Palgrave Macmillan.
- Kartono, Kartini. (1998). Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal Itu? PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marshall, P. (2011). Exporting blasphemy restrictions: The organization of the Islamic conference and the United Nations. *Review of Faith and International Affairs*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/15570274.2011.571418>
- Nugraha, A. (2012). Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy: Between Global Role Aspiration and Co-Religious Solidarity. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 1(1).
- Perwita, A. A. B. (2003). Indonesia's Changing Role in OIC: Is It A" Necessity of Foreign Policy"? *Indonesian Quarterly*, 31(1), 48-58.
- Petersen, M. J., & Kayaoglu, T. (2019). The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights. In *The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights*. University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812295948>
- Rosyadi, I. (1981). Organisasi Konperensi Islam dan masalahnya. Yayasan Idayu Jakarta.

- Sharqieh, I. (2012). Can the organization of Islamic cooperation (OIC) resolve conflicts? *Peace and Conflict Studies*, 19(2).
<https://doi.org/10.46743/1082-7307/2012.1139>
- Skidmore, T. E. (2013). *Modern Latin America* (eighth edition.. ed.): New York, Oxford : Oxford University Press.
- Sørensen, G. (2008). *Democracy and democratization: processes and prospects in a changing world*. Boulder, CO etc : Westview Press.
- Sukma, R. (2004). *Islam in Indonesian foreign policy: Domestic weakness and the dilemma of dual identity*. Routledge.
- Suryadinata, L. (1995). Islam and Suharto's foreign policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. *Asian Survey*, 35(3), 291-303.
- Trumbore, P. F., & Boyer, M. A. (2000). International crisis decision-making as a two-level process. *Journal of Peace Research*, 37(6), 679-697.
- Turbedar, E. (2019). 50 Years of OIC Cooperation: Taking a Future Perspective by Learning from the Past (OIC Outlook, Vol. 2). The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). www.sesric.org/publications-oic-outlook.php
- Ubaedillah, A., Ali, M. and Arfino, B., 2023. Articulation of Islam: President Joko Widodo's Foreign Policy 2014-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), pp.1-12.
- Wirajuda, M. (2014). The impact of democratization on Indonesia's foreign policy: regional cooperation, promotion of political values, and conflict management: ProQuest Dissertations Publishing.
- Wolff, J., & Wurm, I. (2011). Towards a theory of external democracy promotion. *Security Dialogue*, 42(1), 77-96.
 doi:10.1177/0967010610393551
- Regulations, reports, and official document
- OIC, 'The Charter of Organization of Islamic Conference', (2008), available at: <http://www.oic-oic.org/is11/english/Charter-en.pdf> (diakses pada 3 Mei 2023).